

PRAKATA

Alhamdulillah, universitas memfasilitasi penerbitan monograf hasil penelitian.

Penelitian ini tentang strategi pelebagaan good university governance di program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Bertolak dari asumsi bahwa penilaian sangat baik yaitu A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), seharusnya berbanding lurus dengan pengelolaan internal yang baik juga. Pijakan empiris tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa prodi Ilmu Pemerintahan UMY telah mendapatkan akreditasi A (sangat baik) tiga kali berturut-turut dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Buku monograf hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk Majelis Dikti PP Muhammadiyah dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan internal Program Studi di PTM. Selain itu, pengalaman positif dari prodi Ilmu Pemerintahan UMY tersebut dapat menjadi inspirasi bagi prodi-prodi lain di lingkungan PTM. Semakin banyak prodi di lingkungan PTM yang melembagaan good university governance dalam pengelolaan internalnya, maka akan berdampak pada penilaian positif secara eksternal sehingga siap berkompetisi di era global.

MONOGRAF



Strategi Pelebagaan *Good University Governance* di Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Dr. Suswanta, M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Strategi Pelembagaan *Good University Governance* di Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Copyright, Juni 2020
Dr. SUSWANTA, M.Si

Penulis: Dr. Suswanta
Desain: Djoko Supriyanto.

Diterbitkan oleh New Elmatara Publisher

Strategi Pelembagaan *Good University Governance* di Perguruan Tinggi Muhammadiyah
Dr. Suswanta, __ Yogyakarta
LP3M UMY
VI + 67; 17 x 23 cm.

MONOGRAF

*Strategi Pelembagaan Good
University Governance di
Perguruan Tinggi Muhammadiyah*

Dr. Suswanta, M.Si



ELMATERA | 2020

Prakata

Alhamdulillah, universitas memfasilitasi penerbitan monograf hasil penelitian. Penelitian ini tentang strategi pelebagaan *good university governance* di program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Bertolak dari asumsi bahwa penilaian sangat baik yaitu A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), seharusnya berbanding lurus dengan pengelolaan internal yang baik juga. Pijakan empiris tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa prodi Ilmu Pemerintahan UMY telah mendapatkan akreditasi A (sangat baik) tiga kali berturut-turut dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Buku monograf hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk Majelis Dikti PP Muhammadiyah dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan internal Program Studi di PTM. Selain itu, pengalaman positif dari prodi Ilmu Pemerintahan UMY tersebut dapat menjadi inspirasi bagi prodi-prodi lain di lingkungan PTM. Semakin banyak prodi di lingkungan PTM yang melembagaan *good university governance* dalam pengelolaan internalnya, maka akan berdampak pada penilaian positif secara eksternal sehingga siap berkompetisi di era global.

Daftar Isi

Prakata - IV

Daftar isi - V

BAB I | PENDAHULUAN - 1

BAB II | KONSEP GOOD GOVERNANCE DAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE - 7

Konsep good governance - 7

Definisi - 7

Elemen, Domain dan Prinsip - 9

Konsep Good University Governance - 10

Definisi dan Prinsip - 10

Budaya Akademik Versus Korporasi - 12

BAB III | PEMETAAN HASIL STUDI GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE - 15

BAB IV | STRATEGI PELEMBAGAAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE DI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FISIPOL UMY - 27

Pengantar - 27

Rencana Strategis - 27

Strategi Pelembagaan Good University Governance - 43

BAB V | PENUTUP - 63

Daftar Pustaka - 64

Daftar Tabel

Tabel 4.1	Tema Renstra - 30
Tabel 4.2	Topik Riset - 31

Daftar Gambar

Gambar 4.1	Tahapan Penataan Organisasi UMY - 45
Gambar 4.2	Pola School di Prodi IP UMY - 49
Gambar 4.3	Tata Kelola JK School of Government - 50

BAB I

Pendahuluan

Salah satu persoalan sekaligus tantangan utama perguruan tinggi Indonesia di era global, termasuk perguruan tinggi Muhammadiyah adalah tata kelola (*governance*). Globalisasi membawa konsekuensi kompetisi sangat ketat dalam konteks perguruan tinggi. Sejumlah negara di Asia, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, China, Taiwan, Korea Selatan dan Jepang membangun perguruan tinggi menjadi berskala internasional. Kata kunci untuk memenangkan persaingan global adalah kualitas tata kelola internal.

Fakta inilah yang membuat Kemenristekdikti menjadikan tata kelola (*governance*) perguruan tinggi sebagai prioritas. Dalam rencana strategisnya, Direktorat Pendidikan Tinggi telah menetapkan pentingnya membangun kesehatan organisasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitasnya. Kualitas sebuah perguruan tinggi diukur dari penerapan prinsip-prinsip *Good University Governance*. Terdapat enam hal yang harus diperhatikan dalam mengelola perguruan tinggi yang baik, yaitu (1) Tata kelola, (2) Pengelolaan program akademik, (3) Sumberdaya manusia, (4) Pendanaan, (5) Aset perguruan tinggi, (6) Penjaminan mutu. (Esha, 2007).

Penyelenggaraan institusi pendidikan saat ini memasuki tantangan baru yang belum terpikirkan sebelumnya. Banyak perubahan yang harus disiapkan oleh institusi pendidikan jika ingin tetap bertahan dari persaingan yang semakin ketat.

Perubahan lingkungan pendidikan tinggi yang terjadi secara radikal, seperti regulasi pemerintah, kemajuan teknologi, khususnya komunikasi dan informasi menuntut antisipasi cerdas dari pengelola. Tidak hanya Perguruan Tinggi Swasta (PTS), termasuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yang harus berbenah dalam pengelolaan, tetapi juga Perguruan Tinggi Negeri (selanjutnya disingkat PTN). Dengan kata lain, semua Perguruan Tinggi, baik negeri atau swasta, umum atau keagamaan wajib melakukan pembenahan tata kelola institusinya.

Prinsip-prinsip tata kelola seperti kualitas, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas menjadi tidak terelakkan untuk diterapkan. Masyarakat sebagai penyedia input sekaligus pengguna lulusan senantiasa melakukan penilaian dan evaluasi. Pimpinan perguruan tinggi sebagai pemegang amanah tidak bisa lagi mengelola perguruan tingginya dengan manajemen ala kadarnya dan apa adanya. Manajemen yang berkualitas dan berintegritas menjadi keharusan. Manajemen yang mampu mengintegrasikan sekaligus mensinergikan potensi yang dimiliki dengan kemampuan antisipasi masa depan.

Pengelolaan institusi yang baik akan memberikan dampak positif bagi semua *stakeholder* (pemangku kepentingan). Sebaliknya, pengelolaan institusi yang buruk juga akan berdampak negatif bagi semua *stakeholder*. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah bagaimana melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga berbagai inovasi kebijakan, program dan kegiatan dapat ditopang dengan pembiayaan yang memadai. Sumber-sumber pendanaan baru yang produktif memerlukan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel serta

terjaminnya kebebasan menentukan kurikulum dan bidang akademis lainnya. Konsep yang digunakan untuk mewujudkan itu adalah dengan pelebagaan *Good University Governance* (selanjutnya disingkat GUG).

Dalam kondisi global sekarang ini, pengelolaan institusi pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab pimpinan kampus semata, namun juga seluruh masyarakat kampus termasuk para dosen, pegawai akademik maupun mahasiswa. Pelibatan semua pihak yang berkepentingan meliputi setiap tahapan di dalam proses pembuatan kebijakan kampus, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasannya. Hal ini dilakukan agar semua pihak merasa memiliki tanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas institusi pada lingkungan kampus. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan agar terciptanya prinsip keadilan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan institusi kampus.

Prinsip tentang transparansi bisa diwujudkan dengan pengelolaan keuangan oleh institusi yang terbuka dengan pertanggungjawaban yang bisa diakses oleh siapa saja. Sedangkan untuk prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi bisa dilihat dari bagaimana kebijakan yang dibuat untuk mendukung visi dan misi institusi pendidikan. Dengan demikian, kebijakan kampus dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada pihak kampus dan kelompok tertentu saja, tetapi juga kepada semua *stakeholders* di institusi pendidikan tersebut.

Pijakan empirik penelitian ini adalah program studi Ilmu Pemerintahan, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (selanjutnya disingkat prodi IP Fisipol UMY). Prodi IP Fisipol UMY adalah prodi yang telah mendapatkan akreditasi A (sangat baik) tiga kali berturut-turut

dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Selain itu, secara akademik bereputasi baik, memiliki kapasitas kerjasama dan jaringan nasional maupun internasional serta mengembangkan disiplin keilmuan yang relevan. Selain itu, masing-masing mewakili Perguruan Tinggi Swasta Islam (PTIS), dalam hal ini PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah).

Terkait dengan keberadaan asosiasi disiplin keilmuan, prodi IP UMY juga memiliki peran yang sangat signifikan. Di dalam Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM), Prodi IP Fisipol UMY adalah pengurus sentral atau yang menjadi acuan bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan PTM di seluruh Indonesia. Demikian juga dengan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI), asosiasi program studi Ilmu Pemerintahan seluruh Indonesia dan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan seluruh Indonesia (ADIPSI). Prodi IP Fisipol UMY memiliki peran signifikan karena prodi IP adalah penggagas berdirinya beberapa asosiasi keilmuan tersebut. Selain itu beberapa dosen IP UMY seperti Dr. Titin Purwaningsih, M.Si adalah ketua umum ADIPSI, Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc, Dr. Dyah Mutiarin dan Dr. Suranto, M.Pol adalah pengurus inti ADIPSI dan KAPSIPI.

Penilaian sangat baik oleh pihak eksternal, dalam hal ini Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) maupun kepercayaan publik dengan banyaknya dosen IP UMY yang menjadi pengurus di asosiasi keilmuan seharusnya berbanding lurus dengan terjaminnya tata kelola institusi tersebut secara internal. Asumsi ini yang menjadi dasar penelitian ini. Dengan mendasarkan pada asumsi tersebut, penelitian ini bertujuan

menjelaskan bagaimana strategi pelebagaan GUG yang dilakukan prodi IP Fisipol UMY dalam mengelola organisasinya.

Berdasarkan fakta **di atas**, maka menjadi penting memahami bagaimana strategi pelebagaan GUG di prodi IP Fisipol UMY. Pengalaman strategi pelebagaan GUG yang dilakukan di prodi IP Fisipol UMY tersebut dapat dimanfaatkan sebagai referensi atau replikasi oleh prodi IP Fisipol yang ada di lingkungan PTN maupun PTM. Dengan kata lain, hasil studi dapat digunakan sebagai referensi atau model pelebagaan GUG dalam pengelolaan sebuah prodi di lingkungan PTM maupun PTN. Sejauh ini, dari total 60 prodi IP se Indonesia hanya 7 yang terakreditasi A oleh BAN PT. Sehingga dengan hadirnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan *road map* kepada prodi IP di kampus-kampus lainnya, untuk melebagaan sistem GUG dalam tata kelola organisasinya. Semakin banyak prodi IP yang menerapkan sistem GUG maka semakin banyak pula prodi IP yang siap berkompetisi pada jenjang internasional.

Monograf ini merupakan salah satu output penelitian tentang pelebagaan good university governance di prodi IP Fisipol UMY, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) Fisipol UGM. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan ini dianggap relevan untuk mendapatkan data dan penjelasan tentang strategi melebagaan GUG dalam pengelolaan institusi pendidikan dan model implementasinya. Data penelitian didapat dari sumber utama yakni pemangku kepentingan di prodi Jurusan IP Fisipol UMY melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan *Focus Group Discussion* (FGD). Selain data primer tersebut, ditambahkan juga data sekunder yang didapatkan dari berbagai literature baik jurnal, buku,

majalah, tabloid, media massa, ataupun internet yang berkaitan dengan kajian *good university governance*.

Teknis analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi, observasi dan FGD. Data kemudian dikumpulkan, diklasifikasi dan dianalisis berbasis data dengan menggunakan indikator GUG. Pekerjaan analisis lebih pada upaya mengorganisasikan temuan, dan kemudian mengkonstruksikan temuan tersebut dalam bingkai obyek yang diteliti. Dari analisis inilah akan diperoleh kesimpulan dan rekomendasi sebagai hasil akhir dari penelitian.

BAB II

Konsep Good Governance dan Good University Governance

A. Good Governance

1. Definisi

Konsep *governance* sendiri dikembangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap konsep *government* - yang menjadi titik tekan paradigma tradisional - dan menyempurnakan konsep-konsep yang diusung oleh paradigma *New Public Management* (NPM). Dalam konsep *Government*, Negara merupakan institusi publik yang mempunyai kekuatan memaksa secara sah yang merepresentasikan kepentingan publik (Pratikno, 2005). *Good Governance* menuntut kerjasama tiga pilar yakni pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta. Salah satu lembaga sektor publik yang memberikan kontribusi pada terciptanya sinergi antara pilar *governance* adalah *governance bodies* yaitu suatu lembaga non pemerintah yang diberi mandat dan kewenangan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam bidang tertentu. *Governance bodies* memiliki anggota yang menggambarkan pilar dari *governance* seperti unsur pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha (Dwiyanto, 2004).

Good governance sebagai sebuah sistem mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menunjukkan cara kerja atau proses operasi yang dijalankan oleh sistem tersebut. Karakteristik yang

dimilikinya akan menuntun bagaimana sistem *governance* akan dilaksanakan, karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar yang dioperasionalkan melalui tindakan-tindakan konkrit pada praktek *governance*. United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, mematuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka (Sedarmayanti, 2004).

Istilah *good* dan *governance* secara umum memiliki arti segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan politik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Cakupan pengertian *good governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi juga semua lembaga baik pemerintah, non pemerintah (swasta) dan masyarakat (Hidayat, 2008). Secara konseptual, ada dua pemahaman terkait dengan pengertian *good governance*, yaitu : *Pertama*, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional seperti kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan (Sedarmayanti, 2004).

2. Elemen, Domain dan Prinsip

Mengacu pada United Nations Development Programs (UNDP) yang mendefinisikan *good governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all level*”, maka ada tiga elemen *good governance*, yaitu *economic*, *political* dan *administrative*. *Economic governance* adalah proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan interaksi penyelenggara ekonomi yang kemudian berimplikasi terhadap *equality*, *proverty* dan *quality of life*. Sementara itu *political governance* meliputi proses pembuatan keputusan untuk memformulasi kebijakan. Sedangkan *administrative governance* mencakup sistem implementasi proses kebijakan.

Terkait dengan tiga elemen tersebut, maka ada tiga domain institusi dari *governance*, yaitu *state* (pemerintah/ negara), *private sector* (sektor swasta dan dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Ketiganya saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Pemerintah menciptakan atmosfir hukum dan politik yang kondusif, sektor swasta membuka pekerjaan dan pendapatan, serta masyarakat berperan positif dalam menjalin interaksi sosial, ekonomi dan politik (Mustopadidjaja, 2000).

Terdapat 9 prinsip *good governance*, yaitu *transparancy* (transparansi), *equality* (kesetaraan), *participation* (partisipasi), *rule of law* (penegakkan hukum), *responsive* (daya tanggap), *accountability* (akuntabilitas), *efficiency* (efisiensi) dan *effectiveness* (efektivitas), *concensus orientation* (berorientasi konsensus) dan *strategic vision* (wawasan ke depan) (Islamy, 2003). Prinsip transparansi dalam pengelolaan pemerintahan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah maupun sebaliknya, yaitu kepercayaan tinggi dari

masyarakat memacu pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dalam mensejahterakan masyarakat. Prinsip daya tanggap akan meningkatkan kepekaan penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi dan permasalahan warganya.

Melalui prinsip partisipasi, warga masyarakat disadarkan dan diajak menggunakan haknya untuk ikut berperan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Prinsip penegakkan hukum menjamin bahwa setiap kebijakan yang diambil senantiasa berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat. Prinsip kesetaraan berarti memberi kesempatan yang sama kepada semua warga untuk mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya. Adapun prinsip wawasan ke depan menginspirasi pemerintah untuk selalu membangun dan mengelola pemerintahan dengan visi dan misi yang jelas, terukur dan berorientasi ke masa depan.

B. Good University Governance

1. Definisi

Sebagai sebuah organisasi modern, maka seharusnya perguruan tinggi juga dikelola dengan manajemen modern. Peran dan kontribusinya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta nilai-nilai moral menuntut pengelolaan secara profesional. Perlu kecermatan dan ketepatan dalam pengelolaannya. Pengelola perguruan tinggi, terlebih lagi swasta, termasuk PTM juga harus senantiasa membaca trend masa depan sembari menunjukkan keunggulan yang menjadi pencirinya.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi keharusan. Beberapa prinsip tata kelola yang

baik untuk perguruan tinggi (*Good University Governance*), sebenarnya sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu : Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Kemandirian (*Independency*) dan Kesetaraan (*Fairness*). Mengingat, perguruan tinggi pada dasarnya adalah sebuah organisasi modern yang harus dikelola secara profesional.

Adapun penjelasan masing-masing prinsip adalah sebagai berikut. Secara umum, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam rangka mewujudkan prinsip ini, sebuah perguruan tinggi dituntut menyediakan informasi secara terbuka melalui laman online yang lengkap, akurat, *update* dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Sementara itu, akuntabilitas berarti adanya fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perguruan tinggi. Melalui prinsip ini, akan ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab pejabat struktural kepada civitas akademika, terutama mahasiswa, orang tua atau wali mahasiswa dan pengguna lulusan. Sedangkan responsibilitas terkait dengan pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi, yaitu pelaksanaan tridharma, baik menyangkut pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat kepada civitas akademika serta pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Prinsip kemandirian bermakna pengelolaan perguruan tinggi secara profesional dan mandiri tanpa ada tekanan atau benturan kepentingan dari berbagai pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kemandirian lebih mudah diterapkan untuk perguruan tinggi swasta dibanding negeri, mengingat perguruan tinggi swasta termasuk Muhammadiyah relatif memiliki kemandirian dalam

pendanaan. Sedangkan prinsip kesetaraan dan kewajaran bermakna adanya perlakuan yang adil terkait dengan pemenuhan hak civitas akademika yang memiliki berbagai karakter, khususnya mahasiswa.

Mahasiswa tidak diperlakukan sebagai objek yang hanya dieksploitasi secara finansial, seperti kenaikan uang kuliah, uang praktikum, uang kegiatan kemahasiswaan dan uang kuliah kerja nyata yang selalu naik secara berkala. Akan tetapi mahasiswa diperlakukan sebagai subjek karena juga memiliki peran dan kontribusi penting. Hal ini terlihat dari banyaknya unsur penilaian nilai akreditasi BAN PT yang terkait dengan mahasiswa, yaitu kuantitas, suasana dan prestasi akademik maupun non akademik, tingkat partisipasi mereka dalam perkuliahan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Ada tiga indikasi untuk mengukur kesungguhan dan keberhasilan pimpinan perguruan tinggi dalam mengelola pendidikan. *Pertama*, adalah pengakuan internasional tentang pelayanan prima melalui pengakuan ISO. *Kedua*, pengakuan internasional tentang peringkat lembaga pendidikan kelas dunia atau World Class University (WCU). *Ketiga*, pengakuan nasional tentang standart akademik melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Tiga indikasi ini menunjukkan bagaimana kualitas pengelolaan sebuah perguruan tinggi.

2. Budaya Akademik Versus Korporasi

Meskipun perguruan tinggi pada dasarnya adalah organisasi atau lembaga akademik, akan tetapi tetap harus dikelola secara profesional sebagaimana lembaga bisnis. Dengan kata lain, manajemen pengelolaan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta harus mengakomodir prinsip-prinsip *Good Corporate*

Governance (GCG). Perguruan tinggi dan korporasi memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama organisasi atau lembaga modern. Akan tetapi keduanya memiliki karakter kelembagaan dan dibangun di atas paradigma yang berbeda. Perguruan tinggi adalah lembaga akademik yang tidak berorientasi mencari keuntungan, sementara lembaga bisnis bertujuan mencari keuntungan dan dikelola dengan logika ekonomi.

Mengingat ada persamaan dan perbedaan antara perguruan tinggi dengan korporasi maka diperlukan sebuah strategi cerdas dalam mentransformasikan prinsip-prinsip GCG ke GUG. Strategi yang dapat digunakan adalah meminjam prinsip-prinsip manajemen korporasi dalam pengelolaan perguruan tinggi dengan tetap memprioritaskan aspek pelayanan berkualitas dibanding mencari keuntungan. Perbedaannya terletak pada nilai dan tujuan yang menjiwainya. Prinsip-prinsip manajerial tersebut hendaknya diterapkan untuk mendukung fungsi-fungsi dan tujuan dasar pendidikan tinggi. Selain itu, perbedaan lain adalah dalam hal *stakeholders* yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan perguruan tinggi

Perguruan tinggi perlu menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai budaya organisasi (*Good University Culture*) yang terinternalisasi pada semua civitas akademika. Dengan kata lain, perguruan tinggi harus memiliki sistem nilai yang unggul, telah terinternalisasi pada semua civitas akademika, diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan.

Ada dua hal yang wajib diwaspadai badan terkait dengan penerapan manajemen korporasi dalam perguruan tinggi, yaitu *over commercialism* dan *irrelevant*. *Over commercialism* adalah godaan untuk mengikuti alur logika ekonomi, yaitu profit

menjadi tujuan utama pengelolaan pendidikan. Jika profit menjadi tujuan utama pendidikan, maka akan mencederai dunia pendidikan dan menciptakan ketidakadilan. Mereka yang mampu secara ekonomi yang akan menikmati pendidikan tinggi. Padahal, pendidikan tinggi adalah untuk semua karena semua berhak mengenyam pendidikan tinggi.

Sementara itu, irrelevant merupakan akibat dari over commercialism. Jika profit menjadi tujuan utama, maka pendidikan tinggi akan kehilangan visi dan misi luhurnya, yaitu menciptakan sumber daya manusia berkualitas yang siap menjadi pemenang dalam pertarungan global melalui kegiatan tridharma, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

BAB III

Kajian Terdahulu Tentang Good University Governance

Sejauh penelusuran yang dilakukan, studi tentang GUG yang sudah ada dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, studi tentang penerapan GUG di perguruan tinggi negeri, baik yang berorientasi ilmu umum maupun agama. Studi yang dilakukan oleh Supriyanto dan Eko Nugroho (2015), Mustofa (2016), Betty, dkk. (2016), Desi (2017), Wahyudin (2017), serta Esha (2007), secara umum menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GUG di PTN belum optimal dan konsisten. Secara khusus, dengan mengambil kasus di Fakultas Hukum UGM, hasil studi Supriyanto et al. Menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GUG di UGM pada umumnya dan Fakultas Hukum pada khususnya. Hubungan antar aktor dalam model GUG tidak berjalan efektif dan cenderung normatif sebatas memenuhi ketentuan prosedur. Hal ini terlihat dari masih banyak kebijakan atau program yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, juga masih banyak peraturan yang menimbulkan ketidakjelasan tugas dan fungsi masing-masing organ universitas serta lemahnya koordinasi pada tingkat organ universitas, baik secara personal maupun kelembagaan. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas di Fakultas Hukum UGM masih cenderung terbatas karena hanya

diketahui oleh Dekanat, Senat Fakultas dan Universitas saja. Prinsip keadilan juga masih belum optimal. Hal ini terlihat dari ketidakadilan dalam sistem penggajian dan insentif antara tenaga kependidikan tetap dengan honorer serta terbatasnya akses masuk bagi mahasiswa kurang mampu. Meskipun dari sisi tanggung jawab sosial terhadap publik sudah terlihat ada program dan kegiatan yang berorientasi sosial, baik dalam bidang akademik maupun non akademik, akan tetapi dari sisi responsibilitas, masih banyak kebijakan dan program yang bertentangan dengan etika akademik dan bisnis. Salah satu contohnya adalah program Ekstensi dan Swadaya yang terkesan lebih mengarah kepada bentuk komersialisasi pendidikan (Supriyanto et al., 2016)

Senada dengan penjelasan di atas, studi yang dilakukan Wahab (2013) juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GUG dan citra pada tiga PTN berstatus BHMN di Jawa barat masih rendah serta kurang baik. Meskipun demikian, penerapan prinsip GUG yang terdiri dari dimensi partisipasi, *rule of law*, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, kesetaraan dan inklusivitas, efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap citra yang meliputi dimensi *reputation*, *personality*, *ethics/value* dan *corporate identity* serta keunggulan bersaing. Belum optimalnya implementasi prinsip GUG tidak hanya pada PTN umum tetapi juga PTN agama (Islam). Hasil studi Jabar (2016) menunjukkan bahwa tata kelola pelebagaan dalam penyelenggaraan tridharma Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon juga belum berjalan optimal dan memuaskan. Persoalan mendasar yang ditemukan adalah lemahnya budaya kerja dan komitmen, kurangnya konsolidasi dan pendayagunaan sumber

daya akademik, minimnya kesadaran dan rasa tanggung jawab kolektif dalam memahami, menghayati dan melaksanakan visi, misi dan tupoksi serta program secara konsisten sesuai peraturan yang berlaku. Hasil studi juga menjelaskan bahwa indikasi kelemahan antara lain terlihat dari belum adanya keterbukaan dalam pengaturan, pengelolaan dan implementasi anggaran serta lemahnya akuntabilitas, responsivitas dan kreativitas civitas akademika.

Melengkapi studi tentang implementasi GUG di PTN, studi Wahyudin et al. (2017) menunjukkan bahwa pada sebagian PTN di Jawa Tengah dan DIY, variabel GUG terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap struktur organisasi, manajemen perencanaan, dan kinerja manajemen keuangan. Variabel struktur organisasi dan manajemen perencanaan juga terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajemen keuangan. Akan tetapi, variabel GUG terbukti tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap budaya organisasi dan variabel budaya organisasi juga terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajemen keuangan. Hasil berikutnya adalah variabel GUG terbukti berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja manajemen keuangan melalui budaya organisasi, struktur organisasi, dan manajemen perencanaan. Hal ini menunjukkan sebuah bukti bahwa PTN harus mempertimbangkan implementasi GUG untuk meningkatkan kinerja manajemen keuangannya. Betty, dkk. (2016), dalam studinya menyimpulkan bahwa efektivitas satuan pengendalian internal dan komitmen organisasi memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap pencapaian GUG pada universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah.

Sejalan dengan studi Betty et al. (2016), berdasarkan hasil studi Muktiyanto (2016), teori kontinjensi menyebutkan bahwa konteks yang berbeda akan menghasilkan kinerja yang berbeda. Hal ini dibuktikan dari penelitian atas 231 Program Studi Akuntansi berbagai PTN dan PTS di Indonesia dengan menggunakan metode analisis *Structural Equation Model* (SEM) dan pendekatan mediasi fit. Hasil studi juga membuktikan bahwa hubungan GUG dan kinerja Program Studi dipengaruhi oleh penerapan akuntansi manajemen, teknik manajemen dan pilihan prioritas strategi sebagai mediasi fit. Terjadi keragaman pengaruh GUG terhadap kinerja beserta mediasinya baik dari signifikansi, besaran, maupun arah hubungan yang ditentukan oleh konteks, yaitu PTN, PTS dan PTS yang berakreditasi A dan B secara khusus dan sektor publik secara umum.

Studi tentang Transparansi dan Penerapan *Good University Governance* juga dilakukan Martini et al. (2016) pada tujuh PTN di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa penerapan GUG ditentukan oleh dimensi *governing board*, otonomi, akuntabilitas, kepemimpinan, dan transparansi. Dimensi yang paling utama adalah transparansi, mengingat indikator dominan yang perlu diperhatikan adalah kemudahan publik untuk mengakses informasi. Dengan demikian, perguruan tinggi fakultas/jurusan/program studi perlu menjamin ketersediaan informasi berkualitas tinggi, terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), khususnya pengguna lulusan. Hal ini penting karena faktor tersebut menjadi kunci kesuksesan bagi PTN di Sumatera Selatan.

Kedua, studi tentang implementasi prinsip GUG di PTS baik umum maupun Islam. Secara umum, studi yang dilakukan oleh Widjajanti dan Kusumaningtyas (2015), Zaini (2013), Pratolo, dkk. (2015) dan Muljo et al. (2014) menunjukkan bahwa permasalahan internal yang dialami oleh PTS di Indonesia adalah belum terjaminnya prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaannya. Hal tersebut terlihat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengendalian program yang berdampak terhadap mutu dan relevansi lulusan yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik instansi pemerintah maupun perusahaan (industri) yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional. Dengan kata lain, prinsip-prinsip GUG, dalam hal ini transparansi, akuntabilitas, independensi dan *fairness* belum diterapkan secara efektif di PTS.

Secara khusus, Widjajanti dan Kusumaningtyas (2015) melakukan studi tentang dampak implementasi GUG dalam meningkatkan pelayanan prima (*Excellent Service*) dan kepercayaan mahasiswa (*trust*) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Dengan menggunakan metode analisis *Student Satisfaction Index (SSI)* ditemukan fakta bahwa masih ada permasalahan dalam efektivitas pembelajaran, pelayanan akademik dosen di luar kelas selama jam kerja dan kelengkapan sarana prasana fisik fakultas. Sedangkan dengan menggunakan metode analisis *Structural Equation Model (SEM)* didapatkan kesimpulan bahwa GUG memiliki pengaruh positif terhadap *Excellent Service* dan *Excellent Service* juga berpengaruh positif terhadap *Trust*. Hal ini bermakna hubungan antara pelaksanaan GUG yang baik dengan *Trust* bersifat tidak langsung. Artinya, pelaksanaan GUG yang baik akan menciptakan *Trust* melalui pelayanan prima (*Excellent Service*).

Sementara itu, hasil studi yang dilakukan Zaini (2013) tentang implementasi prinsip-prinsip GUG di Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan GUG di institusi tersebut masih rendah. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat kampus, belum dilibatkan dalam proses penyusunan peraturan kelembagaan dan turunannya dalam bentuk *Standard Operating Procedure* (SOP). Prinsip-prinsip GUG juga belum diterapkan sepenuhnya dalam menegakkan, menjalankan dan mengevaluasi pelaksanaan aturan formal kelembagaan. Hal ini menyebabkan peraturan formal dan turunannya sulit dipatuhi ataupun diterapkan dengan baik serta menjadi penghambat terciptanya atmosfer akademik yang kondusif.

Melengkapi hasil studi yang sudah ada, Pratolo, dkk. (2015) melakukan studi tentang model pemetaan dan perancangan GUG dan kinerja PTS di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil pemetaan, dapat dilihat ada beberapa PTS besar, sedang dan kecil. PTS besar rata-rata sudah menerapkan pelayanan akademik dan non akademik terintegrasi berbasis teknologi informasi, mulai dari pendaftaran mahasiswa baru, Kartu Rencana Studi (KRS), pembayaran *on-line* dan proses pembelajaran. Sementara PTS menengah dan kecil masih ada yang memberikan pelayanan secara manual. Kesimpulan dari studi Pratolo, dkk. (2015), PTS wajib memiliki pelayanan terintegrasi berbasis Teknologi Informasi -Web. Melalui pelayanan berintegrasi tersebut daya saing PTS tersebut akan meningkat karena mampu melakukan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan *fairness* yang menjadi prinsip-prinsip GUG.

Hasil studi Muljo et al. (2014) tentang optimalisasi penerapan prinsip *Good University Governance* Bidang Akademik Dalam Upaya Mewujudkan *Good University Governance* di Universitas Bina Nusantara (Binus) menunjukkan bahwa terdapat 18 faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerapan prinsip-prinsip GUG dan faktor yang paling berpengaruh adalah sentralisasi operasi dan desentralisasi akademik. Studi tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dan delapan prinsip GUG yaitu *freedom, shared governance, clear rights and responsibilities, selection at merit, financial stability, accountability, regular testing of standards* dan *importance of close cooperation*.

Terakhir, studi terbaru yang dilakukan oleh Mutiarin et.al (2019) yang mengkaji perihal *Good University Governance* dan Internasionalisasi Program Studi dengan fokus studi pada dua program studi di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi Muhammadiyah. Telaahnya adalah pada fokus upaya internasionalisasi yang dilakukan oleh universitas dan program studi dengan melakukan sistem GUG. Penelitian ini mengkomparasikan terkait strategi GUG dalam Internasionalisasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, ada variasi hasil GUG dalam mendorong internasionalisasi universitas. Terletak pada fokus reputasi internasional, fokus pada *networking* internasional serta pada *global branding*.

Secara ringkas, hasil studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat diklasifikasikan dengan memilah hasil penelitian dan keterangan dengan melihat judul serta tahun penelitiannya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin, dkk (2017) berjudul Hubungan GUG dengan Kinerja Manajemen PT. Studi ini menyandarkan lokus penelitiannya terhadap PTN di Jawa Tengah dan DIY ini menunjukkan bahwa variabel GUG terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap struktur organisasi, manajemen perencanaan, dan kinerja manajemen keuangan. Variabel struktur organisasi dan manajemen perencanaan juga terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajemen keuangan. Akan tetapi, variabel GUG terbukti tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap budaya organisasi dan variabel budaya organisasi juga terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajemen keuangan. Hal ini membuktikan bahwa PTN harus mengimplementasikan GUG untuk meningkatkan kinerja manajemen keuangannya.

Kedua, Supriyanto (2016) dengan berfokus pada penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Lembaga PTN, dengan studi kasus pada UGM dan Mustofa. Hasil studi menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GUG di UGM pada umumnya dan Fakultas Hukum pada khususnya. Hubungan antar aktor dalam model GUG tidak berjalan efektif dan cenderung normatif sebatas memenuhi ketentuan prosedur. Hal ini terlihat dari masih banyak kebijakan atau program yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, juga masih banyak peraturan yang menimbulkan ketidakjelasan tugas dan fungsi masing-masing organ universitas serta lemahnya koordinasi pada tingkat organ universitas, baik secara personal maupun kelembagaan.

Permasalahan penerapan GUG juga terjadi di PTN BH seperti UGM.

Ketiga, Betty, dkk. (2013) penelitiannya berjudul Pengaruh Efektivitas Satuan Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencapaian *Good University Governance* Pada Universitas Tadulako Palu, menunjukkan hasil Efektivitas satuan pengendalian intern dan komitmen organisasi memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap pencapaian GUG pada Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Tentunya, studi ini sejalan dengan studi Adi Wiratno et al. (2013) yang menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap GUG.

Keempat, Studi yang dilakukan oleh Ali Muktiyanto, (2016), dengan judul *Good University Governance* dan Kinerja Program dan menarik studi pada Pengaruh Penerapan Akuntansi Manajemen, Teknik Manajemen dan Pilihan Prioritas Strategi Sebagai Model Mediasi Fit. Studinya membuktikan bahwa hubungan GUG dan kinerja Program Studi dipengaruhi oleh penerapan akuntansi manajemen, teknik manajemen dan pilihan prioritas strategi sebagai mediasi fit. Terjadi keragaman pengaruh GUG terhadap kinerja beserta mediasinya baik dari signifikansi, besaran, maupun arah hubungan yang ditentukan oleh konteks, yaitu PTN, PTS dan PTS yang berakreditasi A dan B secara khusus dan sektor publik secara umum. Studi pada 231 Program Studi Akuntansi berbagai PTN dan PTS di Indonesia dengan menggunakan metode analisis *Structural Equation Model* (SEM) dan pendekatan mediasi fit.

Kelima, Supriyanto (2015) penelitiannya berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Kehadiran Dalam Mendukung *Good University Governance* dengan mengambil studi kasus Pada ST3 Telkom, Purwokerto, Prosiding Seminar Nasional serta Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat. Menunjukkan bahwa Pengelolaan kehadiran karyawan ST3 Telkom belum mendukung prinsip GUG yang dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder*. Dengan menggunakan metode *Waterfall*, studi ini bermaksud mengembangkan sistem informasi kehadiran yang menunjang konsep GUG. Pengujian sistem informasi yang dikembangkan menggunakan metode *black box testing*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menampilkan informasi status kehadiran pejabat struktural ST3 Telkom pada papan informasi yang dapat dimanfaatkan *stakeholder* dalam mewujudkan salah satu prinsip GUG, yaitu *responsibilitas*. Perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasi harus memberi manfaat dalam penerapan GUG.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Widjajanti et al. (2015) yang berjudul *Good University Governance* Untuk Meningkatkan *Excellent Service* dan Kepercayaan Mahasiswa dengan studi kasus Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Menunjukkan hasil bahwa masih ada permasalahan dalam efektivitas pembelajaran, pelayanan akademik dosen di luar kelas selama jam kerja dan kelengkapan sarana prasana fisik fakultas. Sedangkan dengan menggunakan metode analisis *Structural Equation Model (SEM)* didapatkan kesimpulan bahwa GUG memiliki pengaruh positif terhadap *Excellent Service* dan *Excellent Service* juga berpengaruh positif terhadap *Trust*. Hal ini

bermakna hubungan antara pelaksanaan GUG yang baik dengan *Trust* bersifat tidak langsung. Pelaksanaan GUG yang baik baru menciptakan *Trust* jika sudah ada bukti nyata yang dirasakan oleh semua pihak yang berkepentingan yaitu pelayanan prima (*Excellent Service*).

Ketujuh, Zaini dan Dahro (2013) dengan penelitiannya tentang *Good University Governance* dalam Perspektif *New Institutionalism* yang mengambil fokus studi pada Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung. Menunjukkan hasil bahwa mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat kampus, belum dilibatkan dalam proses penyusunan peraturan kelembagaan dan turunannya dalam bentuk *Standard Operating Procedure* (SOP). Prinsip-prinsip GUG juga belum diterapkan sepenuhnya dalam menegakkan, menjalankan dan mengevaluasi pelaksanaan aturan formal kelembagaan. Hal ini menyebabkan peraturan formal dan turunannya sulit dipatuhi ataupun diterapkan dengan baik serta menjadi penghambat terciptanya atmosfer akademik yang kondusif. Pemahaman dan penerapan GUG di institusi tersebut masih rendah.

Kedelapan, Pratolo, dkk. (2015) meneliti persoalan *Good University Governance* dan Kinerja Perguruan Tinggi, dengan Model Pemetaan dan Perancangan Kinerja Perguruan Tinggi Melalui Kualitas dan Kompetensi Lulusan, Pelayanan Serta Daya Saing Menuju Kualitas Lulusan dan *World Class University*. Berdasarkan hasil pemetaan, dapat dilihat ada beberapa PTS besar, sedang dan kecil. PTS besar rata-rata sudah menerapkan pelayanan akademik dan non akademik terintegrasi berbasis teknologi informasi, mulai dari pendaftaran mahasiswa baru, Kartu Rencana Studi (KRS), pembayaran *on-line* dan proses pembelajaran. Sementara PTS menengah dan kecil masih ada

yang memberikan pelayanan secara manual. Kesimpulan dari studi Pratolo, dkk. (2015), PTS wajib memiliki pelayanan terintegrasi berbasis Teknologi Informasi -Web. Melalui pelayanan berintegrasi tersebut daya saing PTS tersebut akan meningkat karena mampu melakukan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan *fairness* yang menjadi prinsip-prinsip GUG.

Terakhir, Studi yang dilakukan oleh Muljo et al. (2014) dengan judul Optimalisasi Penetapan Prinsip *Good University Governance* Bidang Akademik dalam Upaya Mewujudkan *Good University Governance*. Menunjukkan hasil bahwa Terdapat 18 faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerapan prinsip GUG dan faktor yang paling berpengaruh adalah sentralisasi operasi dan desentralisasi akademik. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dan 8 prinsip GUG

Berdasarkan pemetaan klasifikasi kajian terdahulu menunjukkan bahwa studi terdahulu memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini. *Pertama* secara faktual, studi terdahulu umumnya lebih menitikberatkan pada penjelasan pelaksanaan GUG di PTN, baik yang sudah BH/BHMN atau yang belum BH/BHMN dan PTN berbasis ilmu umum atau ilmu agama serta PTS baik yang umum atau agama, tetapi belum ada yang meneliti strategi pelebagaan GUG di PTM. *Kedua* secara teoritis, studi ini menitikberatkan pada aspek-aspek penting dalam prinsip GUG secara komprehensif yakni studi ini akan membahas lebih jauh tentang asas kredibilitas, akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab dan keadilan.

BAB IV

Model Strategi Pelembagaan Good University Governance

A. Pengantar

Bab ini akan menjelaskan strategi pelembagaan GUG dalam pengelolaan prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY. Sebelum diuraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata kelola di Program Studi untuk membangun sistem tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil untuk mewujudkan visi, misi serta untuk mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran, akan dijelaskan terlebih dahulu rencana strategis prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY.

B. Rencana Strategis Jurusan IP Fisipol UMY

Prodi Ilmu Pemerintahan didirikan pada tahun 1990 dan memperoleh status Terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 066/0/1990 pada tanggal 23 Juni 1990. Tiga tahun kemudian Prodi Ilmu Pemerintahan memperoleh status Diakui dengan Surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 183/DIKTI/Kep/1993 pada tanggal 26 April 1993. Pada tahun 1996, Prodi Ilmu Pemerintahan memperoleh status Disamakan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan

Tinggi Nomor 373/DIKTI/Kep/1996. Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY memperoleh akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan Surat Keputusan Nomor 01784/Ak-II.1/UMYIMA/XII/1998. Namun pada tahun 2003 prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY berhasil mencapai Akreditasi A dengan Surat Keputusan Nomor 06184/A1-VII-S1-045/UMYIMA/XII/2003. Peringkat akreditasi A ini selanjutnya dipertahankan pada proses reakreditasi pada tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 037/BAN-PT/Ak-XI/S1/I/2009 dan juga pada tahun 2013.

Pada tahun 2006-2008 Prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY berhasil memenangkan Program Hibah Kompetisi A-3 dari DIKTI dengan program Peningkatan Kompetensi Lulusan Jurusan Ilmu Pemerintahan dalam rangka Meningkatkan Efisiensi Eksternal. Dengan program dan dana PHK A-3 tersebut maka akselerasi dalam peningkatan kompetensi dan daya saing lulusan dapat dilaksanakan. Sementara itu, pengembangan kelembagaan berjalan pesat seiring dengan pengembangan laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY pada 2009, dan dibentuknya kelas paralel internasional (*International Class of Governmental Studies/IGOV*) pada 2010, serta pendirian *Jusuf Kalla School of Government* (JKSG) dan Magister Ilmu Pemerintahan UMY pada 2011.

Kegiatan pembentukan jejaring (*networking*) nasional dan internasional pun telah dilakukan. Pada konteks nasional, Prodi IP UMY mengadakan kegiatan Pembentukan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) yang di *launching* bersamaan dengan kegiatan Konferensi Internasional (ICONPO 1) yang dilakukan di Kampus UMY pada awal 2011 yang dihadiri seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia yang

memiliki Prodi IP serta Korea University dan Thammasat University Thailand.

Visi Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY adalah “Menjadi Program Studi Ilmu Pemerintahan yang Unggul dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan yang berlandaskan nilai - nilai Islam untuk kemaslahatan umat di level nasional dan internasional pada 2020.”. Visi tersebut ditentukan selaras dengan visi dan misi universitas sebagai “Universitas yang unggul dan mencerahkan berlandaskan nilai-nilai keislaman bagi kemaslahatan umat”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi, tujuan dan strategi untuk mencapainya.

Adapun Misi Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY adalah menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dalam bidang politik dan manajemen publik, yaitu :

- Menyelenggarakan pendidikan Ilmu Pemerintahan yang unggul dan inovatif.
- Menyelenggarakan penelitian dan kajian Ilmu Pemerintahan yang mengkom-binasikan antara Ilmu Pemerintahan kontemporer dengan nilai - nilai Islam.
- Melaksanakan pengabdian masyarakat yang relevan dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat dengan pendekatan Ilmu Pemerintahan kontemporer yang dilandasi nilai - nilai Islam.

Sedangkan tujuan jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY adalah :

- Terwujudnya alumni yang memiliki kompetensi teoritik dan teknis di bidang pemerintahan berstandar nasional dan internasional yang memiliki nilai - nilai dasar Islam yang kuat.
- Terwujudnya karya-karya ilmiah sivitas akademika dalam publikasi nasional dan internasional yang berguna bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan.

- Terwujudnya pengabdian yang memiliki kemanfaatan bagi stakeholders pemerintahan dan masyarakat.

Renstra 2016-2021 diarahkan untuk menjadikan jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY menjadi terkemuka secara internasional di lingkup ASEAN. Adapun tema yang ditetapkan setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tema dalam Renstra

NO	TAHUN PERIODE	PENETAPAN TEMA
1	2015-2016	Peningkatan tata kelola (<i>governance</i>) organisasi, mutu akademik dosen dan kerjasama
2	2016-2017	Tercapainya mutu Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta publikasi internasional karya ilmiah dosen
3	2017-2018	Peningkatan mutu tenaga kependidikan dan organisasi menuju universitas bereputasi internasional
4	2018-2019	Mempertahankan nilai A dan meningkatkan skor akreditasi BAN PT
5	2019-2020	Tercapainya penjaminan mutu berstandar internasional
6	2020-2021	Tercapainya akreditasi internasional ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA)

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Selanjutnya, untuk menelaah lebih dalam terkait dengan topik riset ini, maka pemetaan pada jalan Penelitian Bidang Governance dan nilai-nilai Islam sebagai arah pengembangan perlu dikemukakan. Sebab, keberhasilan Prodi IP UMY dalam mengembangkan tata kelola organisasinya tidak terlepas dari aspek penunjang lainnya seperti peningkatan mutu penelitian yang bervariasi dan berkorelasi antara Ilmu Pemerintahan dengan landasan nilai-nilai Islam. Berikut tabel 4.2 yang menggambarkan daftar topik riset di Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY:

Tabel 4.2

Topik riset di Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY

NO	TOPIK RISET	2010 – 2013	2014 - 2015	2016 - 2025
1	Partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan publik (<i>public participation and public policy</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan publik (<i>public participation and public policy</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan publik (<i>public participation and public policy</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan publik (<i>public participation and public policy</i>) dan nilai-nilai Islam
2	Partisipasi perempuan dalam pemerintahan (<i>women participation and governance</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang partisipasi perempuan dalam pemerintahan (<i>women participation and governance</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang partisipasi perempuan dalam pemerintahan (<i>women participation and governance</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang partisipasi perempuan dalam pemerintahan (<i>women participation and governance</i>) dan nilai-nilai Islam
3	Partisipasi warga dalam proses legislatif (<i>Participation and representatives</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang partisipasi warga dalam proses legislatif (<i>Participation and representatives</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang partisipasi warga dalam proses legislatif (<i>Participation and representatives</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang partisipasi warga dalam proses legislatif (<i>Participation and representatives</i>) dan nilai-nilai Islam
4	Partisipasi warga dalam pembuatan keputusan publik (<i>participation and public decision making</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang partisipasi warga dalam pembuatan keputusan publik (<i>participation and public decision making</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang partisipasi warga dalam pembuatan keputusan publik (<i>participation and public decision making</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang partisipasi warga dalam pembuatan keputusan publik (<i>participation and public decision making</i>) dan nilai-nilai Islam
5	Pengorganisasian	Penelitian	Penelitian terapan/	Penelitian

	partisipasi warga dalam proses pemerintahan (<i>organization and institutionalization of public participation</i>) dan nilai-nilai Islam	fundamental/ teoritik tentang pengorganisasian partisipasi warga dalam proses pemerintahan (<i>organization and institutionalization of public participation</i>) dan nilai-nilai Islam	operasional tentang pengorganisasian partisipasi warga dalam proses pemerintahan (<i>organization and institutionalization of public participation</i>) dan nilai-nilai Islam	penyusunan dan penerapan model tentang pengorganisasian partisipasi warga dalam proses pemerintahan (<i>organization and institutionalization of public participation</i>) dan nilai-nilai Islam
6	Kebebasan warga berpartisipasi dalam organisasi (<i>freedom of association and expression</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang kebebasan warga berpartisipasi dalam organisasi (<i>freedom of association and expression</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang kebebasan warga berpartisipasi dalam organisasi (<i>freedom of association and expression</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang kebebasan warga berpartisipasi dalam organisasi (<i>freedom of association and expression</i>) dan nilai-nilai Islam
7	Partisipasi publik dan masyarakat yang terorganisasi (<i>public participation and an organized civil society</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang partisipasi publik dan masyarakat yang terorganisasi (<i>public participation and an organized civil society</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang partisipasi publik dan masyarakat yang terorganisasi (<i>public participation and an organized civil society</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang partisipasi publik dan masyarakat yang terorganisasi (<i>public participation and an organized civil society</i>) dan nilai-nilai Islam
8	Partisipasi warga dan partai politik (<i>participation and political parties</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang partisipasi warga dan partai politik (<i>participation and political parties</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang partisipasi warga dan partai politik (<i>participation and political parties</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang partisipasi warga dan partai politik (<i>participation and political parties</i>) dan nilai-nilai Islam
9	Partisipasi warga dalam proses pemerintahan kolaboratif	Penelitian fundamental/ teoritik tentang partisipasi warga	Penelitian terapan/ operasional tentang partisipasi warga dalam proses	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang partisipasi

	<i>(participation and collaborative governance)</i> dan nilai-nilai Islam	dalam proses pemerintahan kolaboratif <i>(participation and collaborative governance)</i> dan nilai-nilai Islam	pemerintahan kolaboratif <i>(participation and collaborative governance)</i> dan nilai-nilai Islam	warga dalam proses pemerintahan kolaboratif <i>(participation and collaborative governance)</i> dan nilai-nilai Islam
10	Perundang-undangan (<i>acts government rules</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/teoritik tentang perundang-undangan (<i>acts government rules</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/operasional tentang perundang-undangan (<i>acts government rules</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang perundang-undangan (<i>acts government rules</i>) dan nilai-nilai Islam
11	Kepemimpinan (<i>leadership</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/teoritik tentang kepemimpinan (<i>leadership</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/operasional tentang kepemimpinan (<i>leadership</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang kepemimpinan (<i>leadership</i>) dan nilai-nilai Islam
12	Penyusunan aturan yang adil bagi semua golongan (<i>fair legal frameworks that are enforced impartially</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/teoritik tentang penyusunan aturan yang adil bagi semua golongan (<i>fair legal frameworks that are enforced impartially</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/operasional tentang penyusunan aturan yang adil bagi semua golongan (<i>fair legal frameworks that are enforced impartially</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang penyusunan aturan yang adil bagi semua golongan (<i>fair legal frameworks that are enforced impartially</i>) dan nilai-nilai Islam
13	Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (<i>full protection of human rights</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/teoritik tentang penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (<i>full protection of human rights</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/operasional tentang penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (<i>full protection of human rights</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (<i>full protection of human rights</i>) dan nilai-nilai Islam
14	Perlindungan bagi kaum minoritas (<i>protection for</i>	Penelitian fundamental/teoritik tentang	Penelitian terapan/operasional tentang perlindungan bagi	Penelitian penyusunan dan penerapan model

	<i>minorities</i>) dan nilai-nilai Islam	perlindungan bagi kaum minoritas (<i>protection for minorities</i>) dan nilai-nilai Islam	kaum minoritas (<i>protection for minorities</i>) dan nilai-nilai Islam	tentang perlindungan bagi kaum minoritas (<i>protection for minorities</i>) dan nilai-nilai Islam
15	Independensi peradilan (<i>Impartial enforcement of laws requires an independent judiciary</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang independensi peradilan (<i>Impartial enforcement of laws requires an independent judiciary</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang independensi peradilan (<i>Impartial enforcement of laws requires an independent judiciary</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang independensi peradilan (<i>Impartial enforcement of laws requires an independent judiciary</i>) dan nilai-nilai Islam
16	Kebersihan lembaga penegak hukum (<i>impartial and incorruptible police force and other institutions</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang kebersihan lembaga penegak hukum (<i>impartial and incorruptible police force and other institutions</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang kebersihan lembaga penegak hukum (<i>impartial and incorruptible police force and other institutions</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang kebersihan lembaga penegak hukum (<i>impartial and incorruptible police force and other institutions</i>) dan nilai-nilai Islam
17	Keterbukaan dan informasi publik (<i>transparency and public information</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang keterbukaan dan informasi publik (<i>transparency and public information</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang keterbukaan dan informasi publik (<i>transparency and public information</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang keterbukaan dan informasi publik (<i>transparency and public information</i>) dan nilai-nilai Islam
18	Keputusan publik yang terbuka dan berdasar aturan (<i>public decisions that follows rules and regulations</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang keputusan publik yang terbuka dan berdasar aturan (<i>public decisions that follows rules and regulations</i>) dan	Penelitian terapan/ operasional tentang keputusan publik yang terbuka dan berdasar aturan (<i>public decisions that follows rules and regulations</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang keputusan publik yang terbuka dan berdasar aturan (<i>public decisions that follows rules and regulations</i>) dan

		nilai-nilai Islam		nilai-nilai Islam
19	penyediaan kebebasan informasi (<i>availability freely information</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang penyediaan kebebasan informasi (<i>availability freely information</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang penyediaan kebebasan informasi (<i>availability freely information</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang penyediaan kebebasan informasi (<i>availability freely information</i>) dan nilai-nilai Islam
20	akses akan informasi publik (<i>directly accessible to public information</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang akses akan informasi publik (<i>directly accessible to public information</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang akses akan informasi publik (<i>directly accessible to public information</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang akses akan informasi publik (<i>directly accessible to public information</i>) dan nilai-nilai Islam
21	kebebasan informasi bagi media massa (<i>it is provided in easily understandable forms for media</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang kebebasan informasi bagi media massa (<i>it is provided in easily understandable forms for media</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang kebebasan informasi bagi media massa (<i>it is provided in easily understandable forms for media</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang kebebasan informasi bagi media massa (<i>it is provided in easily understandable forms for media</i>) dan nilai-nilai Islam
22	responsivitas instansi-instansi pemerintahan (<i>public institutions and responsiveness</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang responsivitas instansi-instansi pemerintahan (<i>public institutions and responsiveness</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang responsivitas instansi-instansi pemerintahan (<i>public institutions and responsiveness</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang responsivitas instansi-instansi pemerintahan (<i>public institutions and responsiveness</i>) dan nilai-nilai Islam
23	pelayanan publik berkualitas (<i>quality of public services</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang pelayanan publik berkualitas (<i>quality of public services</i>)	Penelitian terapan/ operasional tentang pelayanan publik berkualitas (<i>quality of public services</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang pelayanan publik berkualitas (<i>quality of public</i>

		dan nilai-nilai Islam		<i>services</i>) dan nilai-nilai Islam
24	pelayanan publik dan swastanisasi (<i>public services and privatisation</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang pelayanan publik dan swastanisasi (<i>public services and privatisation</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang pelayanan publik dan swastanisasi (<i>public services and privatisation</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang pelayanan publik dan swastanisasi (<i>public services and privatisation</i>) dan nilai-nilai Islam
25	kultur pelayanan publik (<i>public service culture</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang kultur pelayanan publik (<i>public service culture</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang kultur pelayanan publik (<i>public service culture</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang kultur pelayanan publik (<i>public service culture</i>) dan nilai-nilai Islam
26	Pelayanan publik bagi semua warga (<i>serve all stakeholders in public services</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Pelayanan publik bagi semua warga (<i>serve all stakeholders in public services</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Pelayanan publik bagi semua warga (<i>serve all stakeholders in public services</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Pelayanan publik bagi semua warga (<i>serve all stakeholders in public services</i>) dan nilai-nilai Islam
27	Jaringan pelayanan publik (<i>public service networking</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Jaringan pelayanan publik (<i>public service networking</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Jaringan pelayanan publik (<i>public service networking</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Jaringan pelayanan publik (<i>public service networking</i>) dan nilai-nilai Islam
28	Penentuan harga pelayanan publik (<i>public service charging</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Penentuan harga pelayanan publik (<i>public service charging</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Penentuan harga pelayanan publik (<i>public service charging</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Penentuan harga pelayanan publik (<i>public service charging</i>) dan nilai-nilai Islam
29	Aktor, kelompok,	Penelitian	Penelitian terapan/	Penelitian

	organisasi yang berpengaruh terhadap proses pemerintahan (<i>actors, groups, association, organizations in a given society</i>) dan nilai-nilai Islam	fundamental/ teoritik tentang Aktor, kelompok, organisasi yang berpengaruh terhadap proses pemerintahan (<i>actors, groups, association, organizations in a given society</i>) dan nilai-nilai Islam	operasional tentang Aktor, kelompok, organisasi yang berpengaruh terhadap proses pemerintahan (<i>actors, groups, association, organizations in a given society</i>) dan nilai-nilai Islam	penyusunan dan penerapan model tentang Aktor, kelompok, organisasi yang berpengaruh terhadap proses pemerintahan (<i>actors, groups, association, organizations in a given society</i>) dan nilai-nilai Islam
30	Mediasi kepentingan-kepentingan yang berbeda (<i>mediation of the different interests in society</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Mediasi kepentingan-kepentingan yang berbeda (<i>mediation of the different interests in society</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Mediasi kepentingan-kepentingan yang berbeda (<i>mediation of the different interests in society</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Mediasi kepentingan-kepentingan yang berbeda (<i>mediation of the different interests in society</i>) dan nilai-nilai Islam
31	Pencapaian konsensus (<i>to reach a broad consensus in society on what is in the best interest of the whole community and how this can be achieved</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Pencapaian konsensus (<i>to reach a broad consensus in society on what is in the best interest of the whole community and how this can be achieved</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Pencapaian konsensus (<i>to reach a broad consensus in society on what is in the best interest of the whole community and how this can be achieved</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Pencapaian konsensus (<i>to reach a broad consensus in society on what is in the best interest of the whole community and how this can be achieved</i>) dan nilai-nilai Islam
32	Pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berkesadaran kolektif (<i>sustainable and concious human development</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berkesadaran kolektif (<i>sustainable and concious human</i>	Penelitian terapan/ operasional tentang Pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berkesadaran kolektif (<i>sustainable and concious human development</i>) dan	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berkesadaran kolektif (<i>sustainable</i>

		<i>development</i>) dan nilai-nilai Islam	nilai-nilai Islam	<i>and concious human development</i>) dan nilai-nilai Islam
33	Konteks sosio historis masyarakat (<i>understanding of the historical, cultural and social contexts of a given society or community</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Konteks sosio historis masyarakat (<i>understanding of the historical, cultural and social contexts of a given society or community</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Konteks sosio historis masyarakat (<i>understanding of the historical, cultural and social contexts of a given society or community</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Konteks sosio historis masyarakat (<i>understanding of the historical, cultural and social contexts of a given society or community</i>) dan nilai-nilai Islam
34	Resolusi konflik (<i>conflict resolution</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Resolusi konflik (<i>conflict resolution</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Resolusi konflik (<i>conflict resolution</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Resolusi konflik (<i>conflict resolution</i>) dan nilai-nilai Islam
35	Masyarakat madani/masyarakat utama/masyarakat Islam sebenarnya (<i>civil society/Islamic society</i>) (<i>a society's well being</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Masyarakat madani/masyarakat utama/masyarakat Islam sebenarnya (<i>civil society/Islamic society</i>) (<i>a society's well being</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Masyarakat madani/masyarakat utama/masyarakat Islam sebenarnya (<i>civil society/Islamic society</i>) (<i>a society's well being</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Masyarakat madani/masyarakat utama/masyarakat Islam sebenarnya (<i>civil society/Islamic society</i>) (<i>a society's well being</i>) dan nilai-nilai Islam
36	Hubungan individu dan atau kelompok, sehingga ada perasaan hidup bersama (<i>relations of individuals and groups that all its members feel that they have a stake</i>)	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Hubungan individu dan atau kelompok, sehingga ada perasaan hidup bersama (<i>relations of individuals and groups that all its</i>	Penelitian terapan/ operasional tentang Hubungan individu dan atau kelompok, sehingga ada perasaan hidup bersama (<i>relations of individuals and groups that all its members feel that</i>	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Hubungan individu dan atau kelompok, sehingga ada perasaan hidup bersama (<i>relations of individuals and groups that all its</i>

	<i>in it and do not feel excluded from the mainstream of society</i>) dan nilai-nilai Islam	<i>members feel that they have a stake in it and do not feel excluded from the mainstream of society</i>) dan nilai-nilai Islam	<i>they have a stake in it and do not feel excluded from the mainstream of society</i>) dan nilai-nilai Islam	<i>members feel that they have a stake in it and do not feel excluded from the mainstream of society</i>) dan nilai-nilai Islam
37	Kebebasan dan jaminan keamanan kehidupan kelompok (<i>all groups have opportunities to improve or maintain their well being</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Kebebasan dan jaminan keamanan kehidupan kelompok (<i>all groups have opportunities to improve or maintain their well being</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Kebebasan dan jaminan keamanan kehidupan kelompok (<i>all groups have opportunities to improve or maintain their well being</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Kebebasan dan jaminan keamanan kehidupan kelompok (<i>all groups have opportunities to improve or maintain their well being</i>) dan nilai-nilai Islam
38	Perencanaan pembangunan yang bersifat bottom-up (<i>bottom-up development planning</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Perencanaan pembangunan yang bersifat bottom-up (<i>bottom-up development planning</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Perencanaan pembangunan yang bersifat bottom-up (<i>bottom-up development planning</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Perencanaan pembangunan yang bersifat bottom-up (<i>bottom-up development planning</i>) dan nilai-nilai Islam
39	Perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat (<i>development planning meet the needs of society</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat (<i>development planning meet the needs of society</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat (<i>development planning meet the needs of society</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat (<i>development planning meet the needs of society</i>) dan nilai-nilai Islam
40	Restrukturisasi	Penelitian	Penelitian terapan/	Penelitian

	organisasi (<i>arrangement of organization structure</i>) dan nilai-nilai Islam	fundamental/ teoritik tentang Restrukturisasi organisasi (<i>arrangement of organization structure</i>) dan nilai-nilai Islam	operasional tentang Restrukturisasi organisasi (<i>arrangement of organization structure</i>) dan nilai-nilai Islam	penyusunan dan penerapan model tentang Restrukturisasi organisasi (<i>arrangement of organization structure</i>) dan nilai-nilai Islam
41	Manajemen sumberdaya manusia (<i>human resources management</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Manajemen sumberdaya manusia (<i>human resources management</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Manajemen sumberdaya manusia (<i>human resources management</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Manajemen sumberdaya manusia (<i>human resources management</i>) dan nilai-nilai Islam
42	Politik dan manajemen keuangan (<i>financial management and politics</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Politik dan manajemen keuangan (<i>financial management and politics</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Politik dan manajemen keuangan (<i>financial management and politics</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Politik dan manajemen keuangan (<i>financial management and politics</i>) dan nilai-nilai Islam
43	Pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan dan proteksi lingkungan (<i>sustainable use of natural resources and the protection of the environment</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan dan proteksi lingkungan (<i>sustainable use of natural resources and the protection of the environment</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan dan proteksi lingkungan (<i>sustainable use of natural resources and the protection of the environment</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan dan proteksi lingkungan (<i>sustainable use of natural resources and the protection of the environment</i>) dan nilai-nilai Islam
44	Akuntabilitas publik dan penciptaan pemerintahan	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Akuntabilitas publik	Penelitian terapan/ operasional tentang Akuntabilitas publik dan penciptaan	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang

	kredibel (<i>accountability is a key requirement of good governance</i>) dan nilai-nilai Islam	dan penciptaan pemerintahan kredibel (<i>accountability is a key requirement of good governance</i>) dan nilai-nilai Islam	pemerintahan kredibel (<i>accountability is a key requirement of good governance</i>) dan nilai-nilai Islam	Akuntabilitas publik dan penciptaan pemerintahan kredibel (<i>accountability is a key requirement of good governance</i>) dan nilai-nilai Islam
45	Akuntabilitas publik instansi pemerintahan (<i>governmental institutions</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Akuntabilitas publik instansi pemerintahan (<i>governmental institutions</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Akuntabilitas publik instansi pemerintahan (<i>governmental institutions</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Akuntabilitas publik instansi pemerintahan (<i>governmental institutions</i>) dan nilai-nilai Islam
46	Akuntabilitas publik organisasi perusahaan (<i>the private sector</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Akuntabilitas publik organisasi perusahaan (<i>the private sector</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Akuntabilitas publik organisasi perusahaan (<i>the private sector</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Akuntabilitas publik organisasi perusahaan (<i>the private sector</i>) dan nilai-nilai Islam
47	Akuntabilitas publik organisasi sosial (<i>civil society organizations</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Akuntabilitas publik organisasi sosial (<i>civil society organizations</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Akuntabilitas publik organisasi sosial (<i>civil society organizations</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Akuntabilitas publik organisasi sosial (<i>civil society organizations</i>) dan nilai-nilai Islam
48	Akuntabilitas publik dan kontrol parapihak (<i>stakeholders control</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Akuntabilitas publik dan kontrol parapihak (<i>stakeholders control</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Akuntabilitas publik dan kontrol parapihak (<i>stakeholders control</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Akuntabilitas publik dan kontrol parapihak (<i>stakeholders control</i>) dan nilai-

				nilai Islam
49	Akuntabilitas pembuatan keputusan publik (<i>public policy</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Akuntabilitas pembuatan keputusan publik (<i>public policy</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Akuntabilitas pembuatan keputusan publik (<i>public policy</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Akuntabilitas pembuatan keputusan publik (<i>public policy</i>) dan nilai-nilai Islam
50	Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan (<i>actions</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan (<i>actions</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan (<i>actions</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan (<i>actions</i>) dan nilai-nilai Islam
51	Pertanggungjawaban kepada kelompok sasaran (<i>organization or an institution is accountable to those who will be affected by its decisions or actions</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Pertanggungjawaban kepada kelompok sasaran (<i>organization or an institution is accountable to those who will be affected by its decisions or actions</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Pertanggungjawaban kepada kelompok sasaran (<i>organization or an institution is accountable to those who will be affected by its decisions or actions</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Pertanggungjawaban kepada kelompok sasaran (<i>organization or an institution is accountable to those who will be affected by its decisions or actions</i>) dan nilai-nilai Islam
52	Sistem pelaporan internal (<i>internal reports</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Sistem pelaporan internal (<i>internal reports</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Sistem pelaporan internal (<i>internal reports</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Sistem pelaporan internal (<i>internal reports</i>) dan nilai-nilai Islam
53	Sistem pelaporan eksternal (<i>external reports</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Sistem pelaporan eksternal (<i>external reports</i>) dan nilai-	Penelitian terapan/ operasional tentang Sistem pelaporan eksternal (<i>external reports</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Sistem pelaporan eksternal (<i>external reports</i>)

		nilai Islam		dan nilai-nilai Islam
54	Keterbukaan dan akuntabilitas (<i>accountability cannot be enforced without transparency</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Keterbukaan dan akuntabilitas (<i>accountability cannot be enforced without transparency</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Keterbukaan dan akuntabilitas (<i>accountability cannot be enforced without transparency</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Keterbukaan dan akuntabilitas (<i>accountability cannot be enforced without transparency</i>) dan nilai-nilai Islam
55	Keterbukaan dan penegakan aturan (<i>accountability cannot be enforced without the rule of law</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian fundamental/ teoritik tentang Keterbukaan dan penegakan aturan (<i>accountability cannot be enforced without the rule of law</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian terapan/ operasional tentang Keterbukaan dan penegakan aturan (<i>accountability cannot be enforced without the rule of law</i>) dan nilai-nilai Islam	Penelitian penyusunan dan penerapan model tentang Keterbukaan dan penegakan aturan (<i>accountability cannot be enforced without the rule of law</i>) dan nilai-nilai Islam

Sumber: diolah dari berbagai sumber.

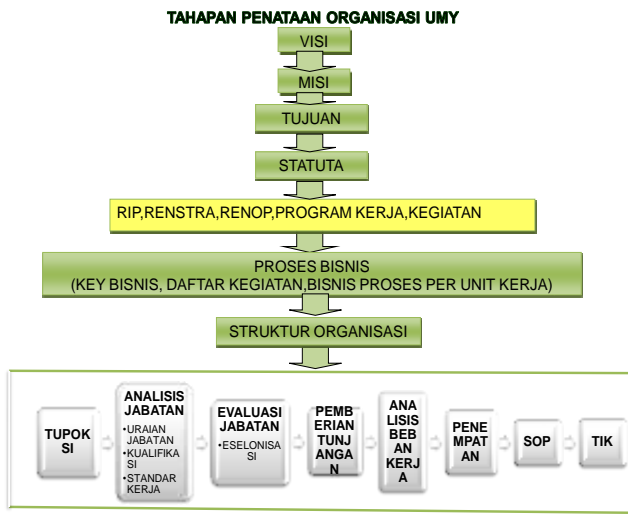
C. Strategi Pelembagaan GUG dalam Pengelolaan Prodi IP Fisipol UMY

Pada dasarnya GUG merupakan konsep tata kelola organisasi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, kredibel, bertanggung jawab dan adil untuk mewujudkan visi, misi serta agar tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, secara ringkas akan diuraikan sistem dan pelaksanaan tata kelola di Prodi IP UMY dalam membangun sistem tata kelola organisasi yang baik berlandaskan prinsip GUG. Pemaparannya adalah sebagai berikut:

Pada level institusi, sistem tata pamong Universitas Muhammadiyah Yogyakarta disusun oleh Tim Perencanaan UMY yang dibentuk oleh Rektor melalui SK Rektor No. 4/SK-UMY/IX/2008 tentang Pengangkatan Tim Perencanaan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang diperbarui dengan SK Rektor No 010/SK-UMY/I/2011 tentang Pengangkatan Tim Perencanaan UMY Tahun 2011, dan SK Rektor No. 180/SK-UMY/I/2012 tentang Pengangkatan Tim Perencanaan UMY tahun 2012, dan pada saat ini berdasarkan SK Rektor No. 162/SK/UMY/VII/2013 sudah dibentuk unit yang khusus mengurus bidang perencanaan dan pengembangan yang di dalamnya juga termasuk urusan tata kelola organisasi, dan lembaga tersebut di beri nama Badan Perencanaan dan Pengembangan (BPP). Lembaga yang berperan dalam penyusunan sistem tata kelola adalah Tim Perencanaan di koordinasikan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (BPM UMY).

Perangkat pendukung dalam Tim Perencanaan antara lain Pedoman PTM, Statuta, RIP, Renstra, Renop, Dokumen Akademik, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Proses Bisnis UMY, Struktur Organisasi UMY, Kode Etik yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan UMY. Adapun tahapan penataan sistem tata kelola UMY digambarkan pada gambar 4.1, berikut uraiannya;



Gambar 4.1 Tahapan Penataan Organisasi UMY

Dalam membangun sistem tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil, serta pelaksanaannya, antara lain dilakukan sebagai berikut:

a. Kredibilitas

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi pengembangan Program Studi Ilmu Pemerintahan, maka diperlukan kepemimpinan yang kredibel melalui proses pemilihan Pejabat Struktural (Level Rektorat, Fakultas dan Program Studi) yang ditentukan melalui mekanisme rekrutmen berlandaskan dasar hukum berupa Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 060/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta UMY, dan Pedoman Pemilihan atau Pengangkatan Pejabat Struktural di UMY seperti yang tertuang dalam SK Rektor Nomor: 158/SK-UMY/XI/2011. Selain itu juga mengacu pada Analisis Jabatan

Pejabat Struktural, seperti yang tertuang dalam SK Majelis Pendidikan Tinggi Pusat Muhammadiyah Nomor: 060/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013 (Pasal 27 s/d 29 Bagian ketujuh, Bab IX tentang Program Studi). Selanjutnya, masing-masing pejabat struktural yang terpilih harus melakukan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam SK Rektor UMY dalam bentuk Analisis Jabatan (Anjab).

Pengambilan keputusan di Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY menggunakan prinsip kolegial, egaliter, dan transparan, artinya keputusan diambil dengan suasana kebersamaan, keterbukaan, dan demokratis. Proses pengambilan keputusan dilakukan mengikuti prinsip kredibilitas yang tercermin dalam rapat-rapat sesuai dengan tingkatan kebutuhan masing-masing. Struktur pengambilan keputusan dan komunikasi Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY dirancang sebagai berikut:

1. **Rapat Kerja Tahunan** Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY. Rapat kerja tahunan dilakukan untuk melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan program studi selama satu tahun mengevaluasi dan menyusun rencana kegiatan tahunan untuk diusulkan dalam rapat tahunan universitas.
2. **Rapat Kerja Tengah Tahunan** Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY secara rutin melakukan rapat kerja tengah tahunan dimana rapat kerja tahunan ini dilakukan setiap 6 bulan sekali, hal ini dilakukan guna mengontrol dan melihat ketercapaian indek kinerja strategis prodi maupun individu dosen.
3. **Rapat Bulanan** Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY dilakukan rutin. Rapat bulanan dilakukan untuk mengevaluasi dan merencanakan kegiatan rutin, membahas

permasalahan dan mencari solusi permasalahan serta distribusi informasi.

4. **Rapat Pengelola Prodi**, dilakukan secara insidental sesuai kebutuhan untuk membahas rencana kegiatan tertentu atau membahas permasalahan khusus yang timbul termasuk teguran indiscipliner kepada dosen, karyawan atau mahasiswa yang dilakukan secara bertahap.
5. **Rapat Koordinasi Dosen** Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY. Rapat ini dilaksanakan sebelum semester berjalan untuk membahas rencana perkuliahan meliputi jadwal kuliah, dosen pengampu, metode pembelajaran, dan referensi. Pada rapat ini, dosen dapat menyampaikan saran dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran.
6. **Penjaringan Aspirasi Mahasiswa**, dilakukan minimal 2 kali dalam satu semester setelah ujian tengah dan akhir semester. Berisi penyampaian visi, misi, tujuan sasaran dan values Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY serta informasi relevan, penyampaian aspirasi mahasiswa dan diskusi

Untuk menjamin terlaksananya tata pamong secara berkelanjutan, dilakukan upaya evaluasi rutin yang melekat dalam setiap kegiatan. Sebagai contoh:

1. Dalam setiap perkuliahan dilakukan dokumentasi kegiatan mengajar dosen untuk memantau kecukupan dan kesesuaian dengan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang telah disusun. Menjelang akhir semester dilakukan evaluasi kinerja mengajar dosen oleh mahasiswa melalui kuesioner yang mencakup aspek metode pembelajaran, kecukupan dan kesesuaian materi, etika, dan internalisasi nilai-nilai keIslaman dan implementasi softskill serta evaluasi tertulis

dari mahasiswa. Hasil evaluasi dari mahasiswa menjadi dasar penilaian kinerja dosen dan perbaikan kinerja dosen.

2. Untuk mengevaluasi kinerja pengurus setiap tahun dilakukan Monitoring dan evaluasi Laporan Kinerja Unit Kerja (LKUK) yang merupakan monitoring terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan, dilakukan setahun 2 kali.
3. Untuk mengevaluasi kinerja secara personal baik untuk karyawan dan dosen, dilakukan laporan SKP yang dilakukan peninjauan setiap 3 bulan sekali dengan memberikan tunjangan bagi yang memenuhi capaian indikator.
4. Secara sistem akademik, dilakukan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) yang menilai pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat karir dosen dan tata pamong di prodi. Juga dilakukan Monev Kurikulum Berbasis Kompetensi secara periodik setiap tahunnya.

Pengelolaan Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dibantu oleh Sekretaris Program Studi, Sekretaris Program Internasional (IGOV) dan Koordinator Laboratorium Ilmu Pemerintahan. Untuk kegiatan pengembangan program studi, maka didirikanlah **Jusuf Kalla School of Government (JKSG)** pada 2011, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan non rutin dibentuk Tim/Kepanitiaan yang bersifat *ad hoc*.

Tata Kelola Pola School (Beyond Department)

Peningkatan daya saing prodi ilmu pemerintahan adalah mengembangkan pola sekolah yang diarahkan *beyond department*, dengan mecontoh kepada universitas-universitas terbaik di dunia,

seperti *Kenendy School of Government, Harvard University* di Amerika Serikat dan *Lee Kuan Yee School of Public Policy, National University of Singapore* di Asia. Istilah *school* mengacu kepada unit yang lebih luas cakupannya daripada departemen yang terdiri dari departemen program sarjana dan program pascasarjana. Pola *school* diarahkan dengan tujuan untuk

- 1) Memperkuat riset berbasis pada rencana induk penelitian;
- 2) Mengembangkan penelitian payung untuk kolaborasi dosen mahasiswa;
- 3) Memperkuat brand prodi-prodi;
- 4) Mengembangkan sumber pendanaan non SPP;
- 5) Memperkuat kerjasama dengan pihak luar dengan lembaga *school*;
- 6) Memperkuat iklim akademik dengan diskusi, seminar dan konferensi terjadwal dengan baik.

Penggunaan nama-nama *school* tersebut diatas dinisbahkan kepada nama tokoh yang berhasil dan berprestasi di tingkat nasional dan internasional.



Gambar 4.2. Pola *School* di Program Ilmu Pemerintahan, Magister Ilmu Pemerintahan dan Program Doktor Ilmu Politik, UMY

Adapun pola tatakelola *school* digambarkan sebagai berikut: (1) Secara keilmuan *school* memayungi program doktor, program master dan program sarjana. (2) Program master dan doktor difokuskan kepada penelitian dan publikasi. (3) Program sarjana difokuskan kepada pengajaran (*teaching*).



Gambar 4.3. Tata Kelola JK School of Government

Pada dasarnya dosen yang mengelola di tiga program adalah dosen-dosen dari *school* yang sama dan saling memperkuat satu sama lain. Pola seperti ini ditujukan untuk mengatasi keterbatasan jumlah staff pengajar dan efisiensi. Pada program master dan doktor hanya memiliki enam dosen.

Pemilihan pengelola Program Studi diatur dalam STATUTA UMY dan SK Rektor tentang Pedoman Pemilihan atau Pengangkatan Pejabat Struktural di UMY seperti yang tertuang dalam SK Rektor No. 158/SK-UMY/XI/2011. Pemilihan Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dilakukan melalui rapat khusus yang dilaksanakan untuk pemilihan ketua program studi, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Calon Ketua Program Studi diusulkan melalui penjangkaran aspirasi dosen dengan mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan dalam SK Rektor.
2. Calon yang memenuhi kriteria dimusyawarahkan untuk dipilih satu orang untuk menjadi Ketua Program Studi periode selanjutnya berdasarkan kemufakatan.
3. Apabila diperoleh kemufakatan maka Ketua Program Studi langsung diajukan kepada rektor untuk mendapatkan persetujuan, namun jika tidak diperoleh kemufakatan, dilakukan pemilihan Ketua Program Studi secara terbuka atau tertutup sesuai kesepakatan.

Pengurus program studi lainnya dipilih dalam rapat program studi yang dipimpin oleh Ketua Program Studi terpilih secara musyawarah, kemudian diajukan kepada rektor untuk mendapatkan persetujuan.

b. Transparansi

Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY berkomitmen untuk menjalankan prinsip transparansi dalam tata pamong. Prinsip transparansi ini tercermin dalam proses pemilihan pejabat struktural sesuai SK Rektor tentang pedoman pemilihan paket calon ketua program studi dan sekretaris program studi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Disamping itu, prinsip ini juga muncul dalam pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai SK Rektor UMY No. 052/SK-UMY/XII/2014 tentang Standar Akademik.

Para pejabat struktural di UMY (level Rektorat, Fakultas maupun Prodi) dalam menjalankan tugasnya menerapkan prinsip transparansi dalam hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Proses Rekrutmen pejabat struktural di semua level sesuai SK Rektor Nomor 158/SK-UMY/IX/2011 tentang cara pemilihan pejabat struktural di tingkat program studi;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan rutin tahunan;
3. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar;
4. Implementasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA/RENOP), pencairan anggaran, serta penggunaan dan pelaporannya;
5. Implementasi tata kelola dan tata kerja dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UMY.

Implementasi prinsip transparansi di atas secara keseluruhan berlandaskan pada nilai nilai Islam sesuai visi organisasi. Prinsip transparansi diwujudkan melalui penetapan kebijakan dan prosedur akademik yang diatur secara tertulis dan disosialisasikan kepada konstituen (mahasiswa, dosen, dan karyawan).

Setiap kebijakan dan prosedur akademik diupayakan agar diatur secara tertulis dan disosialisasikan kepada konstituen (mahasiswa, dosen dan karyawan). Kebijakan dan prosedur akademik mencakup:

1. Kebijakan dan prosedur pelayanan akademik dan sarana prasarana pendukung akademik dibuat dan disosialisasikan dalam bentuk buku/panduan akademik yang dibagikan pada saat penerimaan mahasiswa baru.
2. Tata tertib mahasiswa disampaikan dalam buku panduan akademik yang dibagikan pada saat penerimaan mahasiswa baru.
3. Kode etik dosen disampaikan dalam buku/panduan akademik yang dibagikan kepada dosen.

4. Standar mutu akademik disosialisasikan kepada dosen sebelum perkuliahan semester dimulai.
5. Aturan perkuliahan, silabus, RPS (Rencana Pembelajaran Semester) dan metode penilaian disampaikan pada awal perkuliahan.
6. Pelanggaran terhadap standar mutu akademik oleh dosen berakibat pada teguran lisan, penghilangan hak akademik tambahan pada periode terjadinya pelanggaran, sampai dengan penyampaian surat peringatan secara tertulis oleh program studi.
7. Pelanggaran terhadap tata tertib oleh mahasiswa berakibat pada teguran lisan, penghilangan hak akademik pada periode terjadinya pelanggaran, sampai dengan penyampaian surat peringatan secara tertulis oleh fakultas.
8. Setiap aktivitas akademik dosen terutama kegiatan pengabdian dan penelitian serta pembuatan produk akademik mendapat *reward* dari program studi, baik bagi dosen maupun mahasiswa.
9. Setiap prosedur dan kebijakan yang ada serta perubahannya dilakukan sosialisasi secara memadai dalam forum formal (rapat-rapat) maupun sarana publikasi lainnya.

Implementasi kebijakan dan prosedur dievaluasi secara rutin dalam rapat rutin bulanan program studi dan ditindak lanjuti dalam bentuk perbaikan implementasi dan sosialisasi atau dilakukan perbaikan kebijakan atau prosedur.

Prinsip transparansi juga diterapkan dalam penyampaian informasi kepada mahasiswa, dosen, alumni, dan masyarakat sehingga dapat mengakses informasi-informasi berkaitan dengan penyelenggaraan program studi melalui website, brosur, dan SOP

yang dapat diakses dengan mudah sesuai dengan kepentingan mereka secara bertanggung jawab.

c. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY tercermin dalam pelaporan setiap satuan kegiatan baik di tingkat internal prodi (dalam rapat-rapat pleno prodi) dan eksternal ke pihak atasan (Fakultas) dan Universitas. Laporan terdiri dari laporan keuangan dan laporan kinerja (Audit Mutu Akademik Internal/AMAI).

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas di UMY (semua level) diterapkan baik untuk bidang akademik maupun non akademik. Berikut **implementasi akuntabilitas dalam bidang akademik:**

1. Program dan manajemen akademik mengarah pada tujuan pelaksanaan pendidikan
2. Akuntabilitas pendidikan dan pengajaran
Dalam kaitannya dengan pendidikan dan pengajaran maka dilakukan penekanan pendidikan yang efektif dan efisien dengan selalu mengimplementasikan penyusunan dan pelaporan evaluasi beban kerja dosen (BKD) setiap semesternya.
3. Akuntabilitas tridarma
Kaitannya dengan tridarma perguruan tinggi maka setiap dosen diberi Indek Kinerja Strategis (IKS) yang harus dipenuhi baik dalam sisi penelitian, pengabdian maupun pengajaran. Serta pencapaian Indek Kinerja Strategis (IKS) bagi dosen akan dievaluasi setiap akhir tahun, untuk penelitian dan pengabdian akan dilakukan evaluasi melalui monev penelitian dan pengabdian, sedangkan pengajaran akan dievaluasi melalui beban kerja dosen.

4. Akuntabilitas anggaran
Kaitannya dengan anggaran universitas sudah membuat system yang terintegrasi sehingga akuntabilitas anggaran bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat melalui system anggaran UMY yang mana setiap unit bisa mengajukan pencairan 10 mata anggaran dan jika dari 10 mata anggaran sudah di laporkan maka bisa melakukan pencairan untuk mata anggaran berikutnya.
5. Dalam kaitannya dengan perkembangan studi maka mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY secara rutin melakukan bimbingan akademik kepada dosen pembimbing akademik minimal 4 kali setiap semesternya.

Sedangkan, penerapan prinsip **akuntabilitas di bidang non akademik** antara lain berupa pengembangan program-program non akademik, ketenagakerjaan, dan kegiatan manajemen atau administrasi. Mekanisme sistem akuntabilitasnya berupa penyusunan laporan keuangan oleh tiap-tiap penanggungjawab anggaran. Bahkan setiap periode tertentu dan akhir tahun anggaran tiap unit kerja dan pejabat struktural yang ada diwajibkan membuat laporan akhir tahun sebagai bahan Rapat Kerja Tahunan dalam rangka evaluasi dan penyusunan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

Setiap tahun Rektor selalu menyusun Laporan Tahunan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang dipresentasikan dalam Rapat Senat Universitas dan Pidato Milad UMY dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

d. Bertanggungjawab

Prinsip bertanggung jawab ini tercermin dalam kepatuhan program studi terhadap peraturan perundangan yang berlaku; berlakunya sistem jaminan mutu baik internal maupun eksternal; adanya peraturan tentang kepegawaian; adanya pelaporan yang bersifat akademik maupun administratif. Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY dengan penuh tanggung jawab menjelaskan pelaporan baik yang bersifat akademik maupun administratif sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh universitas. Untuk menjamin hal tersebut, Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY secara rutin melakukan mekanisme evaluasi internal berkaitan dengan hal-hal yang bersifat akademik dan administratif.

Pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY dalam melaksanakan tugas harus bertanggung jawab sesuai tupoksi yang telah ditetapkan dalam deskripsi jabatan. Setiap pertengahan dan akhir tahun akademik, pengelola bertanggung jawab menyusun laporan kegiatan dan laporan keuangan sebagai dasar pengukuran ketercapaian indikator. Setiap dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pada akhir semester dilakukan evaluasi proses belajar mengajar oleh mahasiswa dan tim pengajar.

Implementasi prinsip bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas baik pejabat struktural, dosen maupun tenaga kependidikan berupa pelaporan kinerja rutin, baik untuk kegiatan yang bersifat akademik maupun non akademik. Semua aktivitas yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan sesuai amanah yang telah diberikan. Prinsip ini telah disosialisasikan secara intensif dan diterapkan terkait dengan 10 nilai-nilai budaya organisasi di UMY yang disusun oleh BPM UMY.

e. Adil

Guna menumbuhkan suasana akademik yang kondusif di UMY, implementasi proses bisnis internal baik yang bersifat akademik maupun non akademik senantiasa didasarkan pada prinsip keadilan. Adapun konsep adil di sini mencakup keadilan distributif (sama rasa dan sama rata) dan keadilan komutatif (sesuai dengan kinerja). Adapun pendistribusian pekerjaan dilakukan menjadi empat proses bisnis yang terdiri dari:

- 1) Proses Bisnis Akademik;
- 2) Proses Bisnis Pengelolaan Sumberdaya;
- 3) Proses Bisnis Kemahasiswaan, Alumni dan Promosi;
- 4) Proses Bisnis Organisasi dan Penjaminan Mutu.

Tabel 4.3
Proses Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Akademik Bidang 1	Sumber Daya dan Keuangan Bidang 2	Mahasiswa dan Alumni Bidang 3	Organisasi dan Pengembangan Bidang 4
1. Kurikulum	Karir Dosen	Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian
2. Proses Pembelajaran	Karir Tenaga Kependidikan	Kegiatan Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir	Tata Kelola Organisasi
3. Suasana akademik	Keuangan	Alumni/Lulusan	System Penjaminan Mutu
4. Penelitian	Prasarana dan Sarana		System Informasi
5. Publikasi	Unit Bisnis		Kerjasama Antar Lembaga di Dalam

			Dan Luar Negeri
6. Pember dayaan Masyara kat			Al Islam dan Kemuhammadiyah an (AIK)

Dalam rangka melaksanakan prinsip keadilan tersebut telah dibuatkan uraian tugas yang dituangkan dalam dokumen analisis jabatan.

Dalam setiap implementasi proses bisnis baik akademik dan non akademik maka prinsip keadilan diterapkan dalam rangka mengelola jalannya organisasi. Prinsip keadilan diterapkan dalam setiap pendistribusian pekerjaan baik akademik dan non akademik, baik kepada para pimpinan, dosen, pegawai non edukatif.

Untuk mendukung terlaksananya setiap prosedur dan kebijakan dengan baik setiap dosen, mahasiswa dan karyawan wajib mematuhi aturan dan kode etik yang telah ditetapkan dalam SK Pengurus Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 220/BPH-UMY/XI/2009 tentang Peraturan Pegawai Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Setiap pelanggaran terhadap kode etik telah diatur mekanisme sanksi secara bertahap sesuai jenis dan tingkatan pelanggaran yang dilakukan, mulai dari sanksi teguran lisan, teguran tertulis, skorsing hingga pemberhentian.

Di samping penilaian etika, diatur pula penghargaan atas kinerja dan prestasi dosen, karyawan dan mahasiswa yang memberikan kontribusi positif. Bagi dosen dan karyawan, diterapkan sistem *reward* dan *punishment*. Salah satu *reward* bagi dosen Ilmu Pemerintahan (dengan kualifikasi doktor) adalah mendapatkan tunjangan kinerja akademik Rp. 2.500.000,- dan non akademik sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan yang harus diikuti

dengan pemenuhan standar kinerja akademik tahunan. Demikian pula bagi karyawan akan mendapatkan tunjangan kinerja pekerjaan sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan yang harus diikuti dengan pemenuhan standar kinerja tertentu. Bagi yang tidak memenuhi maka sebagai *punishment* tunjangan tersebut akan ditunda.

Selain itu, diberikan pula *reward* kepada karyawan dan mahasiswa yang telah meraih sejumlah prestasi dan kontribusi positif bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY. Setiap kinerja yang baik dan prestasi yang diraih (baik dalam bidang akademik, minat bakat, dan seni serta wirausaha), Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY memberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat dan dana insentif pendidikan. Adapun beberapa mahasiswa yang mendapatkan *reward* dari Prodi IP UMY karena hasil prestasi mereka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.4
Prestasi Mahasiswa Prodi IP UMY

Nama Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan	Tingkatan (Lokal, Nasional, Internasional)	Prestasi yang Dicapai
Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Tingkat Nasional XII Tahun 2011 di Universitas Muslim Indonesia	Nasional	Harapan I
Kejuaraan Daerah Anggar DIY di Yogyakarta 9-10 April 2011 A.N Yoga Sugama	Regional	Juara I Degen Putera
Kejurnas Anggar 2011 A.N Yoga Sugama	Nasional	Juara III Degen Putera

Pekan Olahraga Provinsi XI DIY Okt 2011	Regional	Juara I Perorangan Degen Putera
Pekan Olahraga Provinsi XI DIY Okt 2011	Regional	Juara I Beregu Degen Putera
Kejurnas Nasional Anggaran Kadet Pemula, Kadet Junior. Jakarta 2012	Nasional	Juara II Degen Putera
Presenter Seminar Internasional ICONPO 2 di Seoul 2012. A.N Maratun Saadah dan Febrianti Tentiana	Internasional	Presenter Terbaik
<i>Student Exchange</i> ke Universitas Sains Malaysia Selama 1 Semester (Sultan, Kelana, Hanry, Miftah, Siti, Mega Rizky.	Internasional	Peserta
<i>Student Exchange</i> ke SIAS China 2012 (Febrianti Tentiana)	Internasional	Peserta
Debat Bahasa Inggris di UI Jakarta Hidayat Arief Subakti	Internasional	Peserta
Hibah PKM Dalam Pimnas 2012 Sakir	Nasional	Pemenang PKM- Penelitian
Hibah PKM Dalam Pimnas 2012 Hidayat Arief Subakti	Nasional	Pemenang PKM- Penelitian
Hibah PKM Dalam Pimnas 2012 Sugiyanto	Nasional	Pemenang PKM- Penelitian
Hibah PKM Dalam Pimnas 2012	Nasional	Pemenang PKM- Penelitian

Said Hamsali		
Pelatihan Metode Penelitian Sosial yang Diselenggarakan di The Asian Foundation, Yogyakarta 2012 A.N Sakir	Internasional	Peserta

Para mahasiswa yang telah meraih prestasi di atas mendapatkan penghargaan atau *reward* dari Prodi IP UMY berupa piagam penghargaan dan uang intensif untuk pengembangan minat dan bakat mereka ke tahap yang lebih lanjut. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas rasa keadilan dari Prodi IP UMY kepada mahasiswa berprestasi, sebab prestasi mahasiswa juga merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan akademik pihak kampus. Tentu, pencapaian ini dapat diraih karena adanya hubungan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, terutama peran aktif mahasiswa dan dosen dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta minat dan bakat.

Untuk menjamin terlaksananya tata kelola secara berkelanjutan, dilakukan upaya evaluasi rutin yang melekat dalam setiap kegiatan. Sebagai contoh, dalam setiap perkuliahan dilakukan dokumentasi kegiatan mengajar dosen untuk memantau kecukupan dan kesesuaian dengan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) dan silabus yang telah disusun. Menjelang akhir semester dilakukan evaluasi kinerja mengajar dosen oleh mahasiswa melalui kuesioner yang mencakup aspek metode pembelajaran, kecukupan dan kesesuaian materi, etika dan internalisasi nilai-nilai keislaman dan implementasi *softskill* serta evaluasi tertulis dari mahasiswa. Hasil evaluasi dari mahasiswa menjadi dasar penilaian kinerja dosen, pejabat struktural dan tenaga kependidikan. Hasil tersebut

sekaligus menjadi bahan bagi perbaikan kinerja pejabat struktural, dosen dan tenaga kependidikan di program studi dan fakultas.

BAB V

Penutup

Sistem tata kelola di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY telah berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata kelola didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata kelola (*input*, proses, *output* dan *outcome* serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata kelola yang baik) telah diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Dengan kata lain, prodi Ilmu Pemerintahan telah melembagaan beberapa prinsip GUG dalam pengelolaannya, yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan adil.

Daftar Pustaka

- Azzahra, Siti, Fatimah, *Manajemen Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Fakultas tarbiyah Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima, NTB*, Tesis, UIN SUKA, Yogyakarta, 2017
- Betty, Ridwan dan Sudirman *Pengaruh Efektivitas Satuan Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencapaian Good University Governance Pada Universitas Tadulako Palu*, Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 12, Desember 2016
- Bradley AO., Dennis. *University Governance-Governing What ?*. Makalah yang disampaikan pada Business Higher Education Round Table Conference, November 2003
- Desi, Nurhikmayanti. *Implementasi Tata Kelola Layanan Publik Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Perguruan tinggi*. Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan, Volume 2. No. 1. Hlm. 24-32, 2017.
- Dwiyanto, Agus, *Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: dari Government ke Governance*. Pidato Pengukuhan Guru Besar FISIPOL UGM, 2004.
- Esha, Muhammad In'am. "Pemikiran Mewujudkan Good University Governance di Perguruan Tinggi Islam." Jurnal el-Hikmah Fakultas tarbiyah UIN Maliki Malang.
- Hidayat, Achmad, R. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Jurnal Ilmiah STIAMI, 2008. Hlm. 57-26.
- Islamy, Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 2003.

- Mutiarin, Dyah. Suswanta dan Darumurti, A. *Good University Governance dan Internasionalisasi Program Studi: Studi Kasus pada 2 Program Studi di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Vol. 5 No. 2, 2019. Hlm, 178-188
- Muktiyanto, Ali. *Good University Governancedan Kinerja Program Studi : Pengaruh Penerapan Akuntansi Manajemen, Teknik Manajemen dan Pilihan Prioritas Strategi sebagai Model Mediasi Fit*, Disertasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Pasca Sarjana, UI, Depok, 2016
- Muljo, Harjono, H. Wicaksono, A dan Riantono, Edward, I. *Optimalisasi Penerapan Prinsip Good Governance Bidang Akademik dalam Upaya Mewujudkan Good University Governance*, Jurnal Binus Business Review, Vol. 5 No. 1 Mei 2014. Hlm. 91-100.
- Mustofa, *Penerapan Kinerja Lembaga PTN Berstatus BHMN: Analisis Penerapan Good Faculty Governance di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta*. Tesis, 2015.
- Pratikno, *Good Governance dan Governability*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Vol. 8. Hlm. 236-248, 2005.
- Pratolo, Suryo. Bambang, Jatmiko dan Manuhara, Wahyu. *Good University Governance dan Kinerja-PT: Model Pemetaan dan Perancangan Kinerja-PT Melalui Kualitas dan Kompetensi Lulusan, Pelayanan Serta Daya Saing Menuju Kualitas Lulusan dan World Class University*. Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol. 12 No. 1 Tahun 2015.
- Recomendations for Good University Governance in Denmark, report by the committee “*University Boards in Denmark*”, 2003

- Sedarmayanti, *Good Government (Pemerintahan yang baik)*; Bandung: CV. Mandar Maju, 2004.
- Stevenson, Michael. *University Governance and Autonomy Problems in Managing Access, Quality and Accountability*. Keynote Address to ADB Conference on University Governance. Denpasar, Indonesia, April 26, 2004
- Sumarto, Hetifah Sj.. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2003
- Supriyanto, Eko Nugroho. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Lembaga PTN: Studi Kasus Pada UGM*. Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Departement Politik Pemerintahan UGM. Yogyakarta, 2015.
- Wahab Abdul Azis, *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good University Governance Terhadap Citra Serta Implikasinya Pada Keunggulan Berasing Perguruan Tinggi Negeri Pasca Perubahan Status Menjadi BHMN : Survey Pada Tiga PTN Berstatus BHMN di Jawa Barat*, Jurnal Administrasi Pendidikan, Volume XVII No. 1 Oktober 2013
- Wahyudin, A. Nurkhin, A dan Kiswanto *Hubungan Good University Governance Dengan Kinerja Manajemen Keuangan Perguruan Tinggi*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, 21 (1) : 60-69, 2017, Nationally Accredited : No. 040/P/2014
- Widjajanti, Kesi, *Good University Governance Untuk Meningkatkan Exellent service dan Kepercayaan Mahasiswa : Studi Kasus Fakultas Ekonomi Universitas Semarang*, Jurnal Dinamika Sosbud, Volume 17 Nomor 2, Juni 2015 ; 68-81
- Widjajanti, Kesi. Kusumaningtyas, E dan Sugiyanto. *Gaya Kepemimpinan dan Good Governance Sebagai Upaya Peningkatan Excellent Service dan Kepercayaan Masyarakat Studi Kasus:*

Dinperindag Jawa Tengah. Jurnal USM. Vol. 17 No.2 Tahun 2015.

Zaini, Muhammad dan Dahro, Ahmad. *Good University Governance dalam Perspektif New Institutionalism Studi Pada Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung.* Tesis, Unila, 2013.